

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2025-2029

PERBUP TABALONG NO. 34, BD 2025/NO. 34, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENSOS No. 9 Tahun 2018; PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 121 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No. 32 Tahun 2022; PERMENKES No. 6 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 7 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 34 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan ini mengatur Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025.